

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penerapan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan, namun praktik pelaporan keberlanjutan belum sepenuhnya konsisten. (Sururi and Gantowati 2023) menegaskan bahwa peningkatan jumlah *sustainability report* di Indonesia masih belum diikuti dengan kualitas pengungkapan yang memadai. Banyak laporan keberlanjutan yang sekadar dijadikan pemenuhan regulasi, sehingga belum mampu berfungsi optimal sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menjadi relevan dalam konteks BPRS, karena jika bank umum dengan sumber daya besar saja masih menghadapi masalah konsistensi, maka BPRS berpotensi mengalami keterbatasan yang lebih besar dalam mengimplementasikan Kinerja *Disclosures* (GRI 2).

Penelitian (Chaerani and others 2024) juga memperkuat fenomena ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan aspek ekonomi berdasarkan GRI 200 di sektor perbankan masih bersifat parsial. Mayoritas bank hanya menekankan indikator distribusi nilai ekonomi (GRI 201), sementara indikator lain seperti dampak ekonomi tidak langsung (GRI 203) atau praktik pengadaan

(GRI 204) sering terabaikan. Akibatnya, laporan keberlanjutan cenderung hanya merepresentasikan sebagian kinerja ekonomi, bukan gambaran utuh kontribusi bank terhadap masyarakat dan perekonomian. Kondisi ini menjelaskan adanya celah dalam pelaporan, terutama pada lembaga kecil seperti BPRS yang menghadapi keterbatasan dalam memenuhi seluruh indikator GRI.

Penelitian (Al Hamzah and Aprilliasari 2024) yang membandingkan laporan keberlanjutan Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat juga menemukan perbedaan menonjol dalam tingkat keterbukaan informasi, meskipun keduanya sama-sama beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini membuktikan bahwa penerapan prinsip syariah tidak serta-merta menjamin konsistensi maupun kualitas pelaporan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menelaah praktik pelaporan BPRS yang secara struktural memiliki sumber daya lebih terbatas dibandingkan bank syariah berskala besar.

(Widyaningsih and Sari 2021) meneliti faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan. Komitmen manajemen serta kapasitas sumber daya manusia terbukti berperan besar dalam menentukan kualitas laporan, sementara faktor eksternal seperti regulasi dan tuntutan *stakeholder* hanya berfungsi sebagai pendorong tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup menjamin kualitas pelaporan jika tidak disertai kesadaran manajemen. Kondisi ini

sangat relevan bagi BPRS yang memiliki keterbatasan modal dan sumber daya manusia, sehingga potensi kendala dalam penyusunan laporan keberlanjutan jauh lebih besar.

Temuan (de Villiers, La Torre et al. 2022) juga menegaskan bahwa *Kinerja Disclosures* (GRI 2) merupakan elemen dasar dalam membangun kredibilitas laporan keberlanjutan. Tanpa adanya transparansi mengenai tata kelola, struktur organisasi, dan etika bisnis, maka pengungkapan kinerja ekonomi tidak akan memiliki legitimasi di mata publik. Dengan demikian, kualitas *sustainability report* BPRS hanya dapat dinilai secara komprehensif apabila GRI 2 dianalisis bersamaan dengan GRI 200.

Sejalan dengan, (Gürtürk and others 2020) menjelaskan bahwa perusahaan yang secara konsisten melaporkan kinerja ekonomi sesuai dengan standar GRI lebih mudah memperoleh legitimasi publik sekaligus dukungan investor. Bagi lembaga keuangan mikro syariah seperti BPRS, hal ini memperlihatkan bahwa pengungkapan indikator ekonomi bukan hanya sebatas kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan strategi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat legitimasi sosial, dan menjaga keberlanjutan usaha.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menegaskan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh capaian kinerja finansial, melainkan juga oleh kesesuaian aktivitas perusahaan dengan nilai, norma, serta harapan masyarakat (*Dowling and Pfeffer 1975*). Sebuah organisasi akan memperoleh legitimasi apabila tindakan yang dijalankan dipandang wajar, pantas, dan dapat diterima oleh lingkungan sosial (*Suchman 1995*). Legitimasi ini bersifat dinamis, artinya dapat melemah apabila perusahaan tidak lagi selaras dengan ekspektasi publik. Oleh karena itu, legitimasi perlu dijaga melalui tindakan yang konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial (*Pertiwi, Putri et al. 2024*).

Teori ini menempatkan laporan sebagai instrumen strategis untuk membangun dan mempertahankan legitimasi. Melalui pengungkapan *General Disclosures* (GRI 2), perusahaan dapat menunjukkan keterbukaan terkait struktur organisasi, tata kelola, serta prinsip etika yang dijalankan (*de Villiers, La Torre et al. 2022*). Sementara itu, *Economic Performance* (GRI 200) menjadi bukti nyata kontribusi perusahaan dalam menciptakan dan mendistribusikan nilai ekonomi. Dengan demikian, penerapan standar GRI bukan

sekadar bentuk kepatuhan administratif, tetapi merupakan strategi yang digunakan untuk memperkuat kepercayaan publik dan menjaga legitimasi jangka panjang (de Villiers, La Torre et al. 2022).

Bagi BPRS Arsa Sejahtera, penerapan teori legitimasi menjadi sangat penting karena lembaga ini tidak hanya dituntut mematuhi regulasi perbankan dan prinsip syariah, tetapi juga harus meyakinkan masyarakat bahwa keberadaannya memberi manfaat nyata. Transparansi dalam GRI 2 dapat memperkuat citra tata kelola yang bersih dan akuntabel, sedangkan pengungkapan GRI 200 memperlihatkan kontribusi BPRS terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Sejalan dengan pandangan (de Villiers, La Torre et al. 2022), laporan keberlanjutan hanya akan dinilai kredibel apabila aspek umum (GRI 2) dan aspek ekonomi (GRI 200) diungkapkan secara terpadu. Dengan demikian, standar GRI berperan strategis bagi BPRS dalam memperoleh pengakuan publik, meningkatkan reputasi kelembagaan, serta memastikan keberlanjutan jangka panjang (de Villiers, La Torre et al. 2022).

2.2.2 Teori Stakeholder

Teori stakeholder yang diperkenalkan oleh (Freeman 1984) menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan atas aktivitasnya yang mencakup karyawan, nasabah, pemasok, regulator, investor, hingga masyarakat sekitar yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu strategi penting untuk menjaga hubungan harmonis dengan para *stakeholder* adalah melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Implementasi CSR memungkinkan perusahaan menyalurkan kepeduliannya terhadap berbagai kepentingan *stakeholder*, sehingga hubungan yang tercipta lebih seimbang. Hubungan yang harmonis inilah yang pada akhirnya menjadi fondasi keberlanjutan jangka panjang perusahaan (Zain 2021).

Konteks pelaporan keberlanjutan, standar *Global Reporting Initiative* (GRI) menjadi instrumen utama dalam penerapan teori *stakeholder*. GRI mendorong perusahaan untuk mengidentifikasi isu-isu material melalui proses konsultasi dengan *stakeholder* dan memastikan bahwa kebutuhan mereka terakomodasi dalam laporan (Sururi and Gantjowati 2023). GRI 2 (*General Disclosures*) menekankan

transparansi dalam identitas organisasi, tata kelola, serta etika, sedangkan GRI 200 (*Economic Performance*) menegaskan pertanggungjawaban ekonomi, mulai dari distribusi nilai ekonomi, dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan, hingga kebijakan publik (Sururi and Gantowati 2023).

Kurangnya keterbukaan informasi dapat melemahkan hubungan perusahaan dengan *stakeholder*, karena tidak ada dasar objektif untuk menilai kinerja organisasi (Sururi and Gantowati 2023). Dalam konteks BPRS Arsa Sejahtera, penerapan standar GRI menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan *stakeholder* yang beragam, mulai dari nasabah mikro hingga regulator nasional. Transparansi tata kelola melalui GRI 2 dan pengungkapan kontribusi ekonomi melalui GRI 200 menunjukkan keberpihakan BPRS kepada masyarakat. Hal ini bukan hanya memperkuat legitimasi sosial, tetapi juga mendukung keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang (Zain 2021).

2.2.3 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang

berkelanjutan. Konsep ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak kegiatan operasional terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. CSR berlandaskan pada prinsip *Triple Bottom Line* (TBL) yang menekankan tiga dimensi utama, profit, people, dan planet (Irawan and Muarifah 2020). Penerapan TBL memungkinkan perusahaan menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga menciptakan nilai bersama yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. CSR bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan komitmen moral perusahaan untuk berkontribusi nyata terhadap masyarakat dan lingkungan (Irawan and Muarifah 2020).

Praktik CSR tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan filantropi atau donasi, tetapi harus terintegrasi dalam strategi dan operasional perusahaan. CSR memungkinkan perusahaan melibatkan pemangku kepentingan, seperti karyawan, konsumen, komunitas lokal, dan pemerintah, dalam merancang dan melaksanakan program yang berdampak positif. Implementasi CSR yang baik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi perusahaan, sekaligus membangun kepercayaan pemangku

kepentingan (Saraswati, Sukoharsono et al. 2023). Dengan demikian, CSR bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat citra perusahaan dan mendukung keberlanjutan operasional.

Bank syariah memiliki CSR dimensi tambahan karena kegiatan operasional harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan transparansi. (Al Hamzah and Apriliasari 2024) menyatakan bahwa bank syariah mengaitkan CSR dengan nilai-nilai syariah sehingga program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pencitraan atau keuntungan finansial, tetapi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah dan pelaku UMKM. Program CSR pada bank syariah dapat mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan UMKM, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan pelestarian lingkungan, yang semuanya dijalankan sesuai prinsip syariah (Al Hamzah and Apriliasari 2024).

Bagi BPRS Arsa Sejahtera, CSR menjadi instrumen strategis untuk memperkuat peran sosial bank. Contoh program CSR BPRS antara lain Layanan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), santunan anak yatim, membantu masyarakat untuk perbaikan ruas jalan yang rusak

yang berada di sekitar kantor BPRS, serta kegiatan pengelolaan sampah penelitian ini sejalan dengan (Al Hamzah and Apriliasari 2024) tetapi BPRS lingkungannya terlalu kecil. Program-program ini dirancang agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip syariah, dan meningkatkan kapasitas ekonomi serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Pelaksanaan CSR BPRS Arsa Sejahtera juga dilaporkan melalui laporan keberlanjutan berdasarkan standar GRI 2 (*General Disclosures*) dan GRI 200 (*Economic Performance*). GRI 2 memuat pengungkapan informasi organisasi, termasuk struktur, strategi, dan kebijakan CSR, sedangkan GRI 200 menekankan pengungkapan dampak ekonomi program CSR terhadap masyarakat dan lingkungan (Yehezkiel and others 2023). Dengan pelaporan berbasis GRI, BPRS dapat menunjukkan bahwa program CSR yang dijalankan terukur, transparan, dan akuntabel, sehingga meningkatkan legitimasi bank di mata pemangku kepentingan dan menegaskan kontribusi nyata bank syariah mikro terhadap pembangunan berkelanjutan (Saraswati, Sukoharsono et al. 2023);(Al Hamzah and Apriliasari 2024).

CSR pada BPRS Arsa Sejahtera bukan sekadar kewajiban moral atau alat pencitraan, tetapi instrumen

manajerial dan etis yang strategis. Implementasi CSR yang konsisten, terintegrasi dengan prinsip syariah, dan dilaporkan sesuai standar GRI memperkuat keberlanjutan operasional, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Saraswati, Sukoharsono et al. 2023);(Al Hamzah and Apriliasari 2024).

2.2.4 Sustainability Report (SR)

Sustainability Report (SR) adalah laporan non-keuangan yang digunakan perusahaan untuk mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada pemangku kepentingan. SR berfungsi sebagai sarana akuntabilitas publik, alat evaluasi, serta media komunikasi strategis perusahaan. SR mencerminkan penerapan *Triple Bottom Line* (TBL) yang menyeimbangkan tujuan ekonomi (*profit*) dengan tanggung jawab sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*) (Ghozali and Chariri 2020). SR memungkinkan perusahaan tidak hanya melaporkan kinerja finansial, tetapi juga mengukur kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Ghozali and Chariri 2020).

Di Indonesia, keberadaan SR diperkuat oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Regulasi ini mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyusun laporan yang memuat pengungkapan tata kelola, strategi keberlanjutan, dan dampak kegiatan usaha terhadap masyarakat dan lingkungan (Ghozali and Chariri 2020). Namun, praktik SR di sektor perbankan masih menunjukkan variasi kualitas. (Azizah and Widiyati 2025) menemukan bahwa banyak bank menyusun SR sekadar untuk memenuhi kewajiban formal, sementara aspek lingkungan masih kurang dibanding aspek ekonomi dan sosial. Hal ini menekankan pentingnya integrasi data, transparansi, dan relevansi laporan.

Karakteristik perusahaan juga memengaruhi kualitas dan fokus SR. (Nafakhatussahariyyah and Utami 2024) membandingkan *Sustainability Report* Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Mandiri, menemukan bahwa bank syariah lebih menekankan aspek sosial dan lingkungan sesuai prinsip syariah, sedangkan bank konvensional lebih menonjolkan aspek ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa identitas kelembagaan dan prinsip operasional

perusahaan menjadi faktor penting dalam menentukan konten dan kualitas SR.

Bagi BPRS Arsa Sejahtera, SR menjadi instrumen strategis untuk menunjukkan kontribusi nyata kepada masyarakat. Melalui SR berbasis GRI 2 dan GRI 200, BPRS dapat melaporkan tata kelola, strategi, dan dampak ekonomi secara terukur (Nafakhatussahariyyah and Utami 2024). SR tidak hanya memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah mikro mampu berperan sejajar dengan lembaga keuangan besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, sekaligus mencerminkan penerapan prinsip syariah dalam praktik bisnis sehari-hari (Nafakhatussahariyyah and Utami 2024).

Secara keseluruhan, CSR dan SR saling terintegrasi sebagai instrumen manajerial dan strategis. CSR menjadi sumber kegiatan sosial dan lingkungan, sedangkan SR berfungsi sebagai media pelaporan dan komunikasi yang transparan. Integrasi kedua konsep ini memungkinkan BPRS Arsa Sejahtera menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, meningkatkan legitimasi, dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan (Nafakhatussahariyyah and Utami 2024).

2.2.5 *Global Reporting Initiative (GRI)*

Global Reporting Initiative (GRI) adalah standar internasional yang paling banyak digunakan dalam penyusunan laporan keberlanjutan atau *Sustainability Report (SR)*. GRI menyediakan kerangka kerja yang sistematis, terukur, dan konsisten untuk mengungkapkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas perusahaan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi kepada pemangku kepentingan (Mutiha 2023). Standar ini memungkinkan laporan keberlanjutan disusun secara komprehensif dan dapat dibandingkan antar organisasi, serta mendukung integrasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* ke dalam operasional perusahaan (Mutiha 2023).

GRI Standards 2021 terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu *Universal Standards*, *Topic Standards*, dan *Sector Standards*. *Universal Standards* mencakup prinsip dasar pelaporan dan pengungkapan umum, termasuk GRI 2 (*General Disclosures*), sedangkan *Topic Standards* berfokus pada isu material seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial (Azizah and Widiyati 2025), *Sector Standards* memberikan panduan khusus untuk sektor industri tertentu. Dalam

penelitian ini, fokus diberikan pada GRI 2 dan GRI 200 (*Economic Performance*) karena keduanya relevan untuk menilai kontribusi BPRS Arsa Sejahtera terhadap pembangunan berkelanjutan (Azizah & Widiyati 2025).

GRI 2 menekankan pengungkapan identitas organisasi, tata kelola, praktik etika, strategi, dan keterlibatan pemangku kepentingan, sehingga perusahaan dapat menunjukkan legitimasi dan akuntabilitas dalam laporan keberlanjutannya (Mutihah 2023). Sementara itu, GRI 200 mencakup indikator ekonomi, termasuk distribusi nilai ekonomi (GRI 201), dampak ekonomi tidak langsung (GRI 203), praktik pengadaan (GRI 204), serta kebijakan publik dan transparansi pajak (GRI 207), yang secara keseluruhan menggambarkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*Global Reporting* 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi GRI di sektor perbankan Indonesia masih parsial. (Al Hamzah and Apriliasari 2024) menemukan bahwa bank syariah cenderung lebih menekankan pengungkapan aspek sosial dan tata kelola, sedangkan pengungkapan indikator ekonomi masih kurang lengkap. Temuan ini sejalan dengan studi (Azizah and Widiyati 2025) yang menunjukkan

adanya kesenjangan antara praktik pengungkapan dan standar GRI 2021. Hal ini menegaskan bahwa tantangan utama penerapan GRI mencakup keterbatasan data, kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen manajemen dalam menyusun laporan yang memenuhi standar internasional.

Bagi BPRS Arsa Sejahtera, penerapan GRI menghadirkan tantangan karena skala usaha yang lebih kecil dibandingkan bank umum atau bank syariah nasional. Namun, hal ini menjadi peluang untuk menilai sejauh mana lembaga keuangan mikro dapat menyusun laporan keberlanjutan yang transparan dan akuntabel. Penerapan GRI pada BPRS dapat memperluas literatur tentang pelaporan keberlanjutan pada sektor keuangan mikro sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas pengungkapan. Dengan integrasi CSR dan SR berbasis GRI, BPRS dapat menunjukkan akuntabilitas, transparansi, dan kontribusi ekonomi yang lebih inklusif, sekaligus memperkuat legitimasi bank di mata pemangku kepentingan (Ananda, Pradesa et al. 2023).

2.2.6 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). Agenda ini berisi 17 tujuan pembangunan yang menekankan aspek peningkatan kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan kualitas lingkungan hidup, serta pengurangan kesenjangan pada tingkat nasional dan internasional (DESA 2018, Sachs 2022). SDGs berlaku sebagai acuan pembangunan yang bersifat universal dan mengikat pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, serta institusi masyarakat.

Konteks organisasi dan bisnis, SDGs digunakan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menjaga stabilitas sosial, dan meminimalkan dampak lingkungan (Bebbington and Unerman 2020, Jimenez-Parra, Fernandez-Gago et al. 2025). Pada sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, penerapan SDGs dilakukan melalui perluasan akses keuangan, dukungan terhadap pemberdayaan usaha mikro,

penciptaan lapangan kerja, penyediaan produk keuangan inklusif, serta pengurangan tingkat kemiskinan. Hal ini relevan dengan karakter lembaga keuangan syariah yang menempatkan prinsip keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan sosial dalam praktik pembiayaan (Van Tulder, Rodrigues et al. 2021).

Keterkaitan SDGs dengan pelaporan keberlanjutan semakin jelas melalui integrasi dengan standar *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI 2 memberikan dasar pengungkapan mengenai tata kelola, kebijakan etika, dan sistem pengawasan, sedangkan GRI 200 berfokus pada kinerja ekonomi yang mencakup pemberdayaan masyarakat dan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi produktif (Erin, Bamigboye et al. 2022). Melalui keterkaitan ini, lembaga keuangan diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi keuangan, tetapi juga kontribusinya terhadap pencapaian SDGs, seperti pengurangan kemiskinan (SDG 1), penciptaan pekerjaan layak (SDG 8), pengurangan ketimpangan (SDG 10).

Perbankan syariah mikro, termasuk BPRS Arsa Sejahtera, relevansi SDGs semakin kuat karena nasabah yang dilayani sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan akses permodalan. Pembiayaan

syariah dalam konteks ini tidak hanya memberikan dukungan modal, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas usaha dan pemerataan akses ekonomi (Weber and ElAlfy 2024). Dengan demikian, kontribusi BPRS terhadap SDGs dapat terlihat melalui dukungan pembiayaan yang mendorong penguatan ekonomi masyarakat dan inklusi keuangan.

Meskipun pelaksanaan SDGs dalam sistem pelaporan keberlanjutan lembaga keuangan syariah masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek pengukuran kontribusi secara terstruktur, indikator kinerja, serta keseragaman pelaporan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah mikro masih berada pada tahap awal penerapan SDGs sehingga pelaporan keberlanjutan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menunjukkan dampak secara kuantitatif (Kanojia, Sharma et al. 2025).

SDGs berfungsi sebagai pedoman pembangunan yang menuntut lembaga keuangan untuk menunjukkan keterlibatannya secara transparan melalui pelaporan keberlanjutan. Pada BPRS Arsa Sejahtera, penguatan integrasi SDGs dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kontribusi terhadap pemerataan ekonomi, pemberdayaan usaha mikro, serta pelaksanaan prinsip keuangan yang adil

dan bertanggung jawab (Bebbington and Unerman 2020,
Sachs 2022).

